

# EVALUASI PILKADA SERENTAK 2015 DAN PEMILU 2019: SEBUAH CATATAN SINGKAT<sup>1</sup>

**Arizka Warganegara**

*Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univeristas Lampung  
Jalan Soemantri Brodjonegoro No.1, Kampus FISIP, Kota Bandar Lampung,  
Indonesia*

Korespondensi: [arizka.warganegara@fisip.unila.ac.id](mailto:arizka.warganegara@fisip.unila.ac.id)

Received 02/05/19

Revised 22/05/19

Accepted 25/05/19

## **Abstract**

*Election is one of the most important indicator of the democratic country, both election in the local and national level. The successful organising simultaneous local election in 2015 and general election in 2019, this indicates that Indonesia is moving forward towards a mature democratic country. Based on the qualitative assessment, there is no systematic election fraud found that could possibly deteriorated the quality of the election both in simultaneous local election in 2015 and general election in 2019 but there are some technical problems that need to be fixed in the future obviously. For example, the lack of capacity electoral commission in defining the election regulations and the problem of logistic distribution, those become among the important problem that need to be evaluated and resolved. This paper endeavours to evaluate the simultaneous local election in 2015 and general election in 2019 by applying qualitative assessment. One of the important finding is the problem of reducing money politics activities especially in the local election. Therefore, the electoral commission need to obtain a solution to reduce this fraud activities in order to decrease the widespread of vote buying activities in the future. In the context of 2019 General Election, there are three problems that need to be fixed. Those three problems are logistics distribution, voter registration and the mode of legislative election system.*

*Keywords: local election, general election and democracy*

## **Abstrak**

Indikator sebuah negara demokrasi selalu diawali dengan adanya pemilihan umum, baik dilevel nasional maupun lokal. Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 dan Pemilu tahun 2019 mengindikasikan bahwa Indonesia sudah menjadi negara yang bergerak menuju negara dengan demokrasi yang matang. Sejauh ini tidak ditemukan konflik yang mengakar di aras public walaupun perhelatan dua *event* demokrasi besar tersebut menyisakan beragam evaluasi dimulai dari kritik terhadap sistem pemilu yang terlalu rumit, penyelenggara yang belum sempurna mengejawantahkan peraturan pemilu di lapangan, kekurangan logistik pemilu dan berbagai pelanggaran pemilu yang ditemukan. Tulisan ini mencoba memberikan catatan terhadap kedua *event* politik tersebut. Catatan yang paling utama bagi Pilkada serentak adalah potensi kecurangan ternyata bukan terletak pada biaya kampanye formal yang pada Pilkada 2015 ditanggung oleh 'penyelenggara', dalam konteks ini penyelenggara harus mampu menemukan formulasi teknis yang dapat mengurangi sebaran politik uang dan hal itu akan lebih bermanfaat bagi kualitas pemimpin yang terpilih. Sedangkan bagi Pemilu 2019, penulis melihat justru persoalan distribusi logistic, pendataan pemilih dan sistem pemilu proporsional terbuka menjadi hal utama yang harus menjadi catatan dalam evaluasi Pemilu 2019.

Kata kunci: pilkada, pemilu dan demokrasi

---

## **EVALUASI PILKADA SERENTAK**

Mendiskusikan politik tanah air hari ini memang tidak bisa lepas dari logika politik berbiaya tinggi, konsep pemilihan langsung secara tidak langsung menyuburkan transaksi politik yang memerlukan biaya politik yang besar. Kanchan Chandra seorang teoritis politik etnis

---

<sup>1</sup> Tulisan ini pengembangan dari paper yang berjudul *Mengevaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak* yang terbit pada LSC Insight. Volume 1 Nomor 5 tahun 2016, dan dua buah opini pada Harian Umum Lampung Post yang berjudul *Mozaik dan Evaluasi Pemilu 2019* terbit pada tanggal 22 April 2019 dan Pemilu dan Politik Transaksional terbit pada tanggal 11 Februari 2019.

menggambarkan dalam demokrasi patronase (*patronage democracy*) terdapat dua kelompok besar, kelompok pertama disebut sebagai *office seeking* atau para pencari ‘jabatan/kekuasaan’ dan kelompok kedua disebut sebagai kelompok *material seeking* atau kelompok yang mencari materi (uang dan materi lainnya). Relasi kedua kelompok ini bersifat resiprokal dan mutual, atau saling memengaruhi dan bergantung satu sama lain.

Perhelatan Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 yang lalu merupakan salah satu *testing* perjalanan demokrasi terbesar di Indonesia disamping pemilihan umum tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014 yang lalu. Boleh dikata Pilkada serentak merupakan salah satu pemilihan umum terbesar di dunia. Secara datatif misalkan Pilkada serentak kali ini diadakan 265 Kabupaten/Kota dengan melibatkan lebih dari 96.165.966 pemilih (Kompas, 13 Oktober 2015).

Penulis intens mengikuti Pilkada serentak kali ini oleh sebab terakit erat dengan riset doktoral yang penulis lakukan, disamping melihat dampak transmigrasi terhadap politik lokal juga terkait dengan kontestasi elit di ranah Politik Lokal Lampung dan nasional. Bergerak dari wilayah ke wilayah di Lampung melakukan interview dengan beragam kalangan mulai dari kelompok politik, pebisnis, *civil society* dan juga akademisi. Memang masih banyak data yang harus dieksplorasi dan di-*detail*-kan akan tetapi ada beberapa catatan sementara yang menarik untuk dibagi dalam kolom ini. Melui tulisan sederhana ini, Penulis tertarik memberikan catatan terhadap Pilkada serentak kali ini.

Beberapa hal yang menjadi catatan dalam perhelatan Pilkada serentak kali ini:

*Pertama*, seolah-olah tidak ada Pilkada, berbeda dengan *event* Pilkada Sebelumnya yang ramai akan atribut kampanye, iklan baik di media eletronik maupun cetak dan gaung Pilkada pun terasa di level *grass root*. Pilkada kali ini terasa sepi, tidak se-heboh Pilkada sebelumnya, tidak lagi dijumpai kehebohan atribut dan antusiasisme masyarakat dalam membahas potensi kemenangan calon dan pertarungan calon.

*Kedua*, aturan yang sudah lumayan *directive* dan *rigid* pada akhirnya menghasilkan Pilkada yang bisa dikatakan lebih *fair*, terutama bagi calon yang tidak mempunyai finansial politik yang banyak. Artinya pengaturan mengenai batas alat peraga kampanye, iklan yang dibiayai dll itu secara tidak langsung mereduksi biaya politik calon, dan catatan penulis untuk *point* ini misalkan, ternyata masih banyak calon yang belum memanfaatkan fasilitas ini, padahal negara memberikan fasilitas itu secara gratis.

*Ketiga*, ini menjadi *testing* yang lumayan mendebarkan terutama bagi penulis dan kawan-kawan pemerhati politik di tanah air. Apakah dengan meliburkan per tanggal 9 Desember 2015 akan berdampak pada meningkatkan tingkat partisipasi politik masyarakat? bagaimana dengan tingkat kejenuhan masyarakat terhadap *event* politik di tanah air? Jawabannya, apakah sudah mesti dibuat sebuah aturan tambahan mengenai kewajiban ‘menyoblos’ dalam event politik tanah air?

*Keempat*, hal menarik lainnya adalah apakah dengan mereduksi biaya kampanye politik akan berdampak pada kemunculan pemimpin yang lebih *bonafit* dengan asumsi biaya politik yang masing-masing kandidat keluarkan tidak sebanyak sebelum aturan pembiayaan atribut kampanye dan iklan diambil alih oleh negara.

*Kelima*, penulis melihat *testing* selanjutnya adalah, jika dengan dihela serentak kali ini, setelah perhelatan tahun 2015 ini penulis pikir pemerintah pusat harus melakukan evaluasi komprehensif soal Pilkada walaupun target akhir dari Pilkada serentak ini sebagai konsep antara, nantinya semua ‘event’ politik tanah air akan dibarengkan dimulai dari pemilu nasional sampai dengan Pilkada tahun 2019. Penulis sangat mewanti-wanti pemerintah, jika ternyata paska perhelatan Pilkada serentak di 2015 dianggap ini gagal, maka ada baiknya tidak usah menunggu sampai dengan 2019. Kembalikan saja Pilkada menjadi pemilihan kepala daerah via DPRD. Dan agar jauh dari potensi money politics, libatkan saja PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam setiap pemilihan kepala daerah.

Menyambut dan terkait dengan uraian diatas kemudian juga menarik menilai apakah aturan Pilkada yang membatasi biaya politik kampanye atau Bahasa-nya membiayai atribut dan dana iklan akan serta merta melahirkan pemimpin yang lebih baik?

Menurut penulis potensi kecurangan justru bukan pada biaya logistik atribut dan kampanye, lebih daripada itu ini soal moral anak bangsa yang sudah sangat pragmatis. Hasil observasi penulis di lapangan misalkan mendapatkan *pragmatism* itu bukan hanya milik elit tapi juga sudah menjadi bagian dari pemilih, sebagian pemilih ‘malahan’ suka untuk di-*money politics*.

Bahkan hasil *interview* penulis dengan peserta Pilkada, disela kampanye ybs kerap sekali di-‘kelitik’ soal oleh-oleh yang dibawa untuk konstituen.

Gejala soal pragmatisme elit dan pemilih ini menjadi bagian yang saling terkait. Pada tahun 2005, ketika Pilkada kali pertama dihela, potensi *money politics* sangat rendah, saat itu masyarakat masih sedikit awam dengan *money politics* dan tensi itu menaik paska Pilkada 2005, dan itu dimulai dari elit itu sendiri manakala mereka mengajarkan perilaku pragmatis pada pemilih sampai terasa kebablasan hari ini. Jika kejadiannya ternyata seperti yang penulis duga, penulis akan menjadi orang yang masih pesimistis dengan berubahnya lanskap politik lokal di tanah air akan menjadi lebih baik walaupun Pilkada dilaksanakan secara serentak dengan beragam aturan yang rigid tersebut.

Dalam kasus Politik India misalkan, politik menjadi dinamis karena dua hal sentiment agama dan etnis dan peran uang yang tidak terkontrol atau *uncontrolled distribution of money*. Kajian Chandra ini memang tidak serta merta bisa menggambarkan realitas politik tanah air, walaupun dalam beberapa sudut teoritis, kasus India dan Indonesia sebenarnya relatif serupa, setidaknya Chandra memberikan argumen teoritis bagaimana demokrasi patronase bekerja di negara-negara seperti India dan tentu saja dalam konteks Indonesia.

Kasus India juga memberikan sebuah *insight* manakala sumber daya negara lebih besar berada pada *public sector* daripada *private sector* maka secara teoritik elit akan mengambil peran dominatif untuk membagi *state resources*. Dalam konteks ini, elit memerlukan pola dalam membagi *state resources* pada pemilih.

Pada bagian lain, politik Indonesia juga sudah mengarah pada *business driven politics*, penguasaan sumber daya alam oleh sekelompok pebisnis membuat pola hubungan antar politisi (lokal) dan pebisnis terbangun atas azas simbiosis mutualisme. Realitas politik berbiaya tinggi yang kemudian menyebabkan menjadi kepala daerah memerlukan biaya politik yang bombastis. Hal ini yang kemudian berdampak pada terbentuknya pola *reciprocal political interest* antar kepala daerah dan pebisnis (lokal). Pada satu sisi kepala daerah memerlukan biaya politik disisi lain pebisnis memerlukan tangan *policy maker* yang bisa mengamankan kebijakan daerah yang pro bagi usahanya.

Transaksi politik juga bukan hanya terjadi antara kepala daerah dan pebisnis tapi juga kepala daerah dan pemilih. Pragmatisme pemilih menjadi bagian yang tidak terpisah dari transaksi politik berbiaya tinggi tersebut. Seperti halnya argumen teoritis diawal, *material seeking* menjadi motif utama pemilih, motif mendapatkan uang, gula, minyak, kopi dan lain sebagainya menjadi 'sesuatu' yang ditunggu setiap kali ada *event* pemilu. Dan, tidak mengherankan jika ajang pilkada dianggap sebagai pesta untuk berbagi bagi politisi dan pemilih.

### EVALUASI POST PEMILU 2019

Pemilu adalah penjabaran paling *modern* demokrasi yang telah berkembang lama, demokrasi juga adalah alat bagi menentukan kepemimpinan politik secara representatif dan reguler. Secara teoritik, konsep demokrasi modern berlandaskan pada filosofi *representation* atau perwakilan.

*Thus*, setiap lima tahun warga negara diminta hak dipilih dan memilihnya untuk disalurkan dalam saluran resmi demokrasi. Satu hal yang menakjubkan adalah tingginya angka partisipasi politik atau *voter turn out* (VTO) pada pemilu kali yang diprediksi mencapai angka lebih dari 80 persen. Dan angka ini melampaui target pemerintah dengan persentase VTO sebesar 77,25 persen.

Beberapa hal mendasar menjadi *concern* kita bersama untuk perbaikan kualitas pemilu dimasa yang akan datang. Secara umum penulis menilai pelaksanaan pemilu ini berjalan dengan relatif baik walaupun sekali lagi setiap Pemilu yang sudah kita lewati tidak pernah ada kata sempurna. Terdapat beberapa catatan mendasar yang perlu dibenahi terutama soal tidak tuntasnya masalah daftar pemilih dan distribusi C-6 serta beberapa pelanggaran pemilu yang ditemukan baik di dalam maupun luar negeri.

### CATATAN POST PEMILU 2019

Keenam catatan penulis untuk Pemilu 2019 adalah sebagai berikut:

*Pertama*, soal pemilu yang disatukan dan bagaimana dengan Pemilu tahun 2024? banyak usulan misalkan Pemilu sebaiknya terbagi dalam dua *level* pemilihan, nasional dan daerah. Penulis melihat Pemilu dengan dua level nasional dan daerah akan sangat *costly* serta tidak efisien, *why?* manajemen logistik akan sangat kerepotan dengan model Pemilu dua level. Penulis sepakat jika Pemilu 2024 dilaksanakan *7 coblosan* sekaligus sehingga masyarakat akan melakukan tujuh kali pilihan politik, dimulai dari Pemilihan Presiden sampai dengan Bupati/Walikota. Pilihan seperti ini akan lebih efisien dan selesai dengan cepat hanya saja sebagai catatan tambahan penulis juga

mengusulkan petugas KPPS boleh melibatkan mahasiswa yang lebih muda dan energik atau setidaknya kombinasi antara mahasiswa dan masyarakat umum.

*Kedua*, penulis melihat *keruwetan* Pemilu kali ini justru disebabkan oleh sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Opsi mengembalikan sistem pileg kepada model proporsional tertutup harusnya dibuka kembali bagi pemilihan legislatif. Proporsional tertutup adalah pilihan ideal jika kita menghindari sistem *first past the post* karena dianggap tidak akomodatif terhadap minoritas. Dengan memilih partai saja ini justru peluang bagi partai untuk membenahi pengaderan internal. Dengan begitu caleg lompat ‘pagar’ akan sangat mungkin diminimalisir, hanya saja sistem ini akan menghasilkan birokrasi partai menjadi terlalu dominan. Secara teoritis, dominasi birokrasi partai akan bisa diminimalisir jika institusi kepartaian dan platform ideologis partai diperkuat. Bagaimana melakukannya? penulis rasa sudah saatnya level partai memberi peluang bagi anggotanya berdasarkan prinsip meritokrasi seperti ide Partai Nasdem soal politik tanpa mahar yang sedikit banyak memengaruhi popularitas partai ini di Pemilu lalu.

*Ketiga*, penulis juga melihat perlu evaluasi model sistem pemilihan bagi anggota DPD-RI, metode pemilihan DPD-RI yang digunakan sekarang mesti ditinjau ulang, jangan hanya berdasarkan pada aspek *popular vote* saja. Sebaran keterpilihan Calon Anggota DPD-RI juga mesti diakomodasi dalam sistem pemilihan, keterpilihan anggota DPD RI mesti juga berdasar pada keterpilihan calon tersebut di seluruh kabupaten/kota secara proporsional.

*Keempat*, banyak pihak atau katakanlah asumsi publik bawah Pemilu 2019 membuat masyarakat seolah terbelah menjadi dua kubu, antara pendukung kubu 01 dan 02. Penulis menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam konteks ini, akan tetapi justru sebaliknya, perdebatan politik di masyarakat akan menjadikan produktif bagi terbentuknya Demokrasi Indonesia menjadi lebih matang. Perdebatan ruang publik secara tidak langsung akan membuat masyarakat terbiasa dengan wacana baru dan ini akan membentuk komunitas-komunitas dialogis antar masyarakat itu sendiri. *Public space* akan sangat produktif jika diskusi-diskusi publik dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. *Hoax* akan sendirinya terkikis ketika ada tradisi berdebat yang baik di masyarakat.

*Kelima*, penulis berada pada posisi bahwa sebaiknya masa kampanye seharusnya dialokasikan waktu lebih panjang, setidaknya 2 (dua) tahun menjelang Pemilu. Secara teknis, kampanye akan lebih produktif jika *starting point*-nya didahului dengan konvensi internal partai politik mengenai siapa saja yang akan dicalonkan sebagai capres, cawapres, cagub, cabup, dan calon legislatif. Hal ini berdampak positif terhadap sisi kualitas si calon yang akan disung. Perdebatan di internal partai yang panjang justru menyegarkan memori masyarakat mengenai siapa yang layak akan dipilih sehingga *voter*. Publik akan dihibur dengan perdebatan mengenai siapa calon terbaik walaupun kondisi ideal seperti ini diperlukan infrastruktur politik yang matang, tapi penulis sekali yakin kita bisa. Dengan begitu, pemilih akan lebih rasional dalam menentukan pilihan politiknya oleh sebab profil para calon sudah mewarnai ruang publik jauh sebelum pemilu berlangsung.

*Keenam*, selama ini *framing* kita terhadap pemilu terlalu *political* dan selalu mengabaikan dampak elektoral dan teknis akibat keadaan geografis dan demografis dan wajar saja setiap pemilu persoalan pokok pemilu itu-itu saja, utamanya soal data pemilih, distribusi logistik dan kartu pemilih (C-6). Dalam konteks ini, reformasi sistem elektoral harus segera dilakukan untuk mencari format sistem Pemilu paling ideal bagi Indonesia dimasa yang akan datang.

## CATATAN AKHIR

Kompleksitas masalah dalam politik tanah air memang tidak pernah lepas dari beberapa persoalan pokok, perilaku membeli suara atau *vote buying activities*, dominasi modal dan pemodal, sentimen agama dan etnis beberapa hal tersebut menjadi topik penting dalam *framing* analisis politik (lokal) tanah air saat ini. Beberapa inovasi untuk menekan *election fraud* (kecurangan pemilu) dilakukan tapi belum juga menghasilkan dampak yang maksimal. Dalam sebuah diskusi dengan Ketua Bawaslu Provinsi beberapa tahun yang lalu, terdapat dua keterbatasan Bawaslu dalam hal *election fraud* yaitu keterbatasan kewenangan dan keterbatasan sumber daya manusia. Apa saja penyebab beragam *election fraud* itu terjadi? bagaimana solusi mengatasi hal tersebut?

Terdapat beberapa alasan terjadinya *election fraud*. *Faktor pertama*, tingkat ekonomi masyarakat masih belum memadai, ini bisa saja menjadi faktor utama terjadinya perilaku *vote buying*, akan tetapi dari beragam kasus, ditemui juga masyarakat dengan pendapatan relatif baik masih menerima *money politics*. Terdapat indikasi perilaku *money politics* telah mengubah persepsi publik terhadap pemilu. Pemilu dianggap sebagai ajang pesta untuk memperoleh sejumlah imbalan material dari politisi kepada pemilih. Dan perilaku ini seolah-olah menjadi hal yang lumrah di masyarakat.

*Faktor kedua*, rendahnya pendidikan politik masyarakat, hal ini berimplikasi pada kecenderungan perilaku permisif terhadap aktivitas *money politics*. Kurangnya kampanye yang massif dan kontinu mengenai pendidikan politik juga merupakan hal yang memberikan peluang terjadinya *election fraud*.

*Faktor ketiga*, lebih pada kelemahan model sistem pemilu yang diterapkan Indonesia saat ini, sebuah model yang mendorong terjadinya *high cost politics*, bayangkan saja penyelenggaraan pemilu saja sudah memakan biaya APBN yang tinggi, kurang lebih 192 juta pemilih yang terdaftar dalam pemilu dan ini menjadi yang terbanyak didunia setelah Amerika Serikat dan India. Belum lagi konsep *direct voting* yang belum secara utuh dipahami oleh elite, faktor demografis dan geografis menjadikan menjamurnya politik berbiaya tinggi. Kompleksitas dan lingkaran permasalahan yang meliputi aktivitas transaksional politik pemilu menjadikan kita harus memunculkan formula sistem pemilu yang dapat mengkanalisasi aktivitas *election fraud* tersebut.

Dalam pandangan penulis, tidak semua pemilu di Indonesia layak diselenggarakan dengan mekanisme *direct voting* atau pemilihan langsung. Pada level provinsi misalkan tidak layak untuk dibuat dengan model pemilihan langsung, pilkada cukup sampai pada level kabupaten dan kota, suara terbanyak untuk pemilihan anggota legislatif juga mesti dipikirkan ulang, kombinasi proporsional dan distrik mesti dipikirkan sebagai jalan keluar. Tentu hal ini akan menjadi debat yang panjang, akan tetapi esensi demokratisasi adalah proses menuju hal yang lebih baik dan dalam proses tentu ada mekanisme coba dan salah

Apa solusi jangka pendek yang bisa kita lakukan untuk setidaknya mengurangi fenomena *election fraud* ini? inovasi sudah coba dilakukan oleh KPU dengan membuat menekan biaya kampanye yang tinggi akan tetapi itu saja tidak cukup, justru praktik politik uang berkembang massif dengan melibatkan transaksi antara pemilih dan kandidat secara langsung bukan menyasar pada materi atau konten pemilu yang akan disampaikan oleh kandidat kepada pemilih. Majelis Ulama Indonesia pun sudah mengeluarkan himbauan mengenai haramnya memberi dan menerima *money politics* tapi sekali lagi usaha ini tidak signifikan untuk menekan aktivitas tersebut.

5

Tulisan kolumnis Russel Berman pada laman theatlantic pada maret 2016 menarik untuk disimak, Berman menulis *there's no separating money from politics*, sebuah kalimat pendek yang dengan tegas menyatakan bahwa hampir tidak mungkin memisahkan uang dengan politik. Pertarungan Bernie Sanders dan Donald Trump dalam pemilu Presiden Amerika Serikat beberapa tahun lalu memberikan sebuah ilustrasi bahwa kandidat dengan finansial yang kuat akan memperoleh keuntungan politik.

*Personal consciousness* (kesadaran pribadi) kita sebagai masyarakat yang peduli politik memang kita dituntut lebih dominan dalam hal ini, pemilu adalah arena pertarungan gagasan dan personality bukan pertarungan kekuatan finansial yang menyebabkan terjadinya *election fraud*. *Election fraud* hanya bisa direduksi dengan sistem pemilu modern yang meminimalkan terjadinya transaksi dan interaksi antar manusia yang terlibat didalamnya, masalahnya berapa lama lagi kita memerlukan waktu untuk sampai pada tahap tersebut? kesadaran kita akan pentingnya legitimasi politik tanpa *election fraud* yang akan mempercepat tahap tersebut tercapai.

Penulis menawarkan perlu ada perubahan cara pandangan warga negara soal Pilkada dan Pemilu yang tadinya sebuah pesta politik (identik dengan kesenangan) menjadi tanggung-jawab dan kewajiban warga negara untuk memilih pemimpin lokal dan nasional yang terbaik berdasarkan hati nurani dan rasionalitas bukan berdasarkan *pragmatism* siapa mendapat apa?

Pada akhirnya, Pilkada serentak tahun 2015 dan Pemilu 2019 sudah berjalan dengan baik dan dapat menjadi momen indah bagi Indonesia untuk menunjukkan pada dunia bahwa bangsa ini sudah menjadi bangsa maju dan beradab berdemokrasi. Kepada para elit politik, pada titik inilah kedewasaan anda semua sebagai elit diuji, mampukah kita dapat menerima kekalahan seperti halnya menerima kemenangan. Membandingkan pemilu kita dengan negara-negara yang sudah ratusan tahun berdemokrasi tentu saja tidak *comparable*akan tetapi hiruk pikuk pemilu kali ini yang terlihat dinamis dan *contested* adalah hal positif yang sebaiknya terus dipupuk bagi perkembangan Demokrasi Indonesia kearah yang lebih dewasa dan matang. *This is not an easy way but surely we can!*

## BIBLIOGRAFI

Berman, Russel. 2016. *How Can the U.S. Shrink the Influence of Money in Politics?* terbit pada 13 Maret 2016 diakses 10 Februari 2019 pada laman <https://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/03/fix-money-in-politics/473214/>

- Chandra, K. 2012. *Constructivist theories of ethnic politics*. Oxford University Press.
- Warganegara, Arizka. 2016. *Mengevaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak*. LSC Insight. Volume 1 Number 5
- Warganegara, Arizka. 2019. *Mozaik dan Evaluasi Pemilu 2019*. Lampung Post, 22 April 2019
- Warganegara, Arizka. 2019. Politik Transaksional. Lampung Post, 11 Februari 2019
- Harian Kompas. *Data Pemilih Pemilukada Serentak tahun 2015*, terbit tanggal 13 Oktober 2015